

BAB II
SEJARAH TERBENTUKNYA YAYASAN TIONGHOA
DI SINGKAWANG TAHUN 1965-2020

A. Etnis Tionghoa Masa Orde Baru

Di masa Orde Baru, pemerintah melabeli etnis Tionghoa sebagai “Masalah”, sehingga dikenal istilah “Masalah Cina”. Mereka adalah “keturunan asing”, “non-pribumi” (nonpri) yang senantiasa mesti diwaspadai. Oleh karena dianggap bukan bagian dari “Indonesia”, maka pihak berwenang mengenakan pengawasan ketat atas simbol-simbol budaya Tionghoa, mulai dari adat istiadat, hingga bahasa dan huruf Tionghoa. Untuk mengawasi gerak-geriknya, maka pada 1973 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Setidaknya terdapat sepuluh aspek kehidupan masyarakat Tionghoa yang diawasi oleh negara.

1. Status kewarganegaraan
2. Pembentukan organisasi
3. Izin tinggal
4. Undang-Undang PMA dan PMDN
5. Agama atau kepercayaan dan adat istiadat Cina
6. Pendidikan
7. Perburuhan
8. Lektur bahasa Cina
9. Surat kabar berbahasa Cina
10. Kesenian, film, piringan hitam dan pita suara

Peristiwa Mei 1998 mengakhiri 32 tahun rezim Soeharto ditulis dalam buku resmi Sejarah Nasional Indonesia Pemutakhiran sebagai “kerusuhan rasial” dan orang-orang Tionghoa melakukan “eksodus ke luar negeri”, serta “terjadi pula pemerkosaan terhadap sejumlah besar perempuan-perempuan Indonesia keturunan Cina”. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, sebetulnya Presiden Habibie-sebagai pemimpin di masa transisi (1998-1999)

sudah melakukan beberapa hal yang cukup fundamental seperti penghentian pemakaian istilah “pri” dan “non-pri” (Inpres No.4/1998) serta penghapusan.

Kemunculan singkawang sebagai sebuah kota tak terlepas dari era desentralisasi yang dimulai setelah orde baru tumbang atau reformasi bergulir. Singkawang merupakan sebuah kota baru yang dibentuk pada tahun 2001. Lokasinya terletak di Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan yang terbesar di wilayah seluas 504 km persegi (0,34% dari luas Kalimantan Barat secara keseluruhan). Wilayah bagian Selatan dan Timur, Kota Singkawang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang. Sementara di bagian Utara, berbatasan dengan Kabupaten Sambas dan di bagian Barat, dengan laut Natuna.

Pada masa orde baru, perayaan tahun baru orang Tionghoa serta perayaan-perayaan kebudayaan lain ini dilarang melalui Instruksi Presiden No. 14/1967. Peraturan tersebut melarang semua hal terkait dengan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina di Indonesia yang tentu saja menimbulkan dampak yang signifikan bagi orang Tionghoa. Meski semua perayaan kebudayaan ini telah diperoleh kembali, termasuk mempertunukannya di ruang publik, namun pelarangan tersebut telah terlanjur memengaruhi masyarakat etnik Tionghoa. Pelarangan tersebut berpengaruh pada bagaimana cara warga etnik Tionghoa mempersepsikan identitasnya sebagai warga Negara (Fathimah, 2020:59)

Periode pasca orde baru tidak hanya dimaknai sebagai fenomena pergantian rezim kepemimpinan, tetapi juga perubahan kebijakan yang menyangkut hak-hak kewarganegaraan. Mengutip Klinken, demokratisasi pasca orde baru membawa perubahan tentang makna menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Salah satu persoalan terkait hak-hak kewarganegaraan yang krusial dan menjadi perhatian diawal-awal reformasi adalah hak-hak kewarganegaraan etnik Tionghoa. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya dua kebijakan di era Presiden Habibie, yaitu Inpres No. 26 Tahun 1998 yang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program atau

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan Inpres No. 4 Tahun 1999, yaitu penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) sebagai syarat pembuatan dokumen pendidikan.

Kemudian, diikuti dengan kebijakan serupa di era Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu pencabutan Keppres No.6 Tahun 2000 mengenai pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina. Perhatian pada persoalan ini menggarisbawahi fakta yang tidak dapat disanggah mengenai adanya kebiakan yang diskriminatif terhadap etnik Tionghoa selama periode orde baru. Fakta ini pula yang berujung pada tragedi kekerasan di mana etnik Tionghoa menjadi sasaran korban terbesar dalam amuk masa tahun 1998, yang mengawali proses reformasi di negeri ini. Secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa rezim orde baru mewariskan residu prasangka terhadap etnik Tionghoa yang tidak mungkin hilang hanya dengan bergantinya rezim dan berubahnya kebijakan.

B. Latar Belakang Berdirinya Yayasan Tionghoa di Singkawang

Kedatangan orang Tionghoa dapat dikatakan membawa perubahan yang penting bagi Singkawang. Orang Tionghoa didatangkan secara massal oleh penguasa Melayu dalam hal ini Sultan Sambas dan Panembahan Mempawah pada 1740 dan 1760, dengan maksud untuk mengelola pertambangan emas yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan kongsi yang pesat membuat daerah-daerah di sekitarnya menjadi daerah penyangga yang penting. Keberadaan mereka baru tergambar setelah mereka didatangkan oleh penguasa-penguasa Melayu di Sambas dan Mempawah. Diawali dengan kedatangan 20 orang Tionghoa dari Brunei pada 1740 atas Undangan Panembahan Mempawah, yang melihat potensi emas di daerah aliran Sungai Duri. Undangan serupa terhadap orang-orang Tionghoa pun datang dari Sultan Sambas, Umar Akkamaddin pada 1760. Setelah itu, kedatangan orang Tionghoa langsung dari Tiongkok semakin meningkat seiring bertambahnya kebutuhan akan pekerja di tambang emas yang semakin berkembang. Orang Tionghoa asal Tiongkok ini datang dan masuk ke daerah pertambangan di

pedalaman melalui sungai-sungai kecil yang berada di pesisir pantai barat Borneo.

Orang-orang Tionghoa telah datang ke Singkawang sejak abad ke-18. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja Tambang, Petani dan pedagang. Kondisi ini terus berkembang dan menjadi latar penting dalam melihat perkembangan penduduk Tionghoa di Singkawang hingga saat ini. Satu abad kemudian, Singkawang sudah di kenal sebagai ibu kota Montrado, salah satu 'Distrik Tionghoa' yang ada di Kalimantan Barat selain Sambas. Kuatnya pengaruh penduduk Tionghoa di daerah ini menyebabkan seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Barat pada waktu itu di kenal sebagai 'Distrik Tionghoa'.

Pada masa awal kongsi, Singkawang telah menunjukkan sebagai daerah pemukiman yang penting dengan posisinya sebagai jalan masuk para penambang ke daerah pertambangan emas di sekitar Montrado. Selanjutnya pada masa kejayaan kongsi Singkawang menjadi semacam kota satelit kongsi besar Foeshoen yang berpusat di Montrado yang memungkinkan Singkawang memiliki penduduk dengan berbagai profesi selain penambang dan petani. Perlu menjadi catatan bahwa petani termasuk kelompok masyarakat yang seak pertama telah mendiami daerah pinggiran Singkawang mengingat tanah di sekitar Singkawang yang cocok untuk bercocok tanam padi. Tampaknya kelompok petani ini bukan termasuk kelompok kedua. Kelompok ini menyelenggarakan kegiatan pertanian secara mandiri. Jumlah petani di Singkawang mulai bertambah seak pertengahan abad ke-19 dikarenakan perpindahan orang-orang dari wilayah kongsi akibat dari pertikaian antar kongsi dan serangan militer Belanda. Jumlah ini terus bertambah saat pemerintah kolonial melancarkan tindakan pembersihan terhadap kongsi mereka secara besar-besaran.

Kelompok orang Tionghoa yang membentuk kongsi tidak selalu berasal dari desa yang sama namun adakalanya berasal dari desa-desa yang berbeda. Masing-masing dari mereka dipimpin lo-thai. Selanjutnya secara bersama mereka memilih pemimpin kongsi yaitu kap-thai sebagai para pemimpin adalah dua tahun, namun jika dipilih kembali dapat berkuasa selama dua

periode atau lebih. Pemilihan pemimpin akan dilakukan apabila pemimpin lama tidak dapat lagi menalankan tugas karena mengundurkan diri (karena masa kepemimpinannya telah habis atau karena sebab lain), meninggal atau berpindah. Selain itu terdapat sebuah dewan yang memutuskan perkara-perkara serius. Kantor dewan dan tempat pertemuan berada di thang, balai kota dan kuil kematian. Perkara mereka bicarakan secara terbuka. Sampai di sini, kita dapat melihat sisi demokratis dari kongsi. Lain halnya, tentu saja, dengan konsep pemilihan pemimpin pada keraaan-keraaan Melayu yang menggunakan konsep genealogis.

Pada masa awal kedatangannya, bentuk permukiman mereka tampak menyebar. Sebagian ada yang bermukim di sepanjang daerah pantai dan sebagian yang lainnya menyebar ke daerah pedalaman. Mereka yang bermukim di sepanjang pantai, dapat hidup dari hasil pertanian atau sebagai pedagang dan pemilik warung. Melalui mereka itulah orang-orang Cina yang berada di daerah pedalaman mendapatkan suplai bahan kebutuhan pokok sehari-hari.

Sungai merupakan alur transportasi utama, baik dalam pergerakan maupun perpindahan orang Cina ke daerah pedalaman. Laju pertumbuhan penduduk orang Cina dipedalaman tampak semakin tinggi, terutama pada akhir abad ke-18 M. Begitu mendengar suatu lokasi yang diduga mengandung deposit emas, merekapun mendatangnya dan segera mendirikan tempat bermalam yang sifatnya sementara. Biasanya tempat tinggal itu terletak di tepi sungai yang tak jauh dari lokasi tempat mereka bekerja. Para orang Cina pionir sebagai penambang emas dan biasanya bekerja secara berkelompok. Pada awal masa pertualangan mencari lokasi tambang baru, banyak di antara mereka menerima bekal dan para penguasa Melayu yang mengundangnya, baik itu dalam bentuk peralatan maupun bahan mentah untuk keperluan konsumsi mereka sehari-hari.

Keberadaan Singkawang sebagai wilayah entreport dari kongsi di Montrado nampaknya cukup strategis. Dari Singkawang, bahan pokok dan pekerja tambang yang didatangkan dari luar pesisir barat untuk kebutuhan kongsi di Montrado dapat masuk. Sebuah tempat antara Singkawang dan

Montrado adalah Kulor yang berada di sebelah timur Singkawang yang menjadi tempat pemberhentian bagi orang-orang yang melakukan perjalanan antara Singkawang dan Montrado. Untuk sampai ke sana harus melalui hutan dan rawa-rawa. Jalan dari kayu ulin yang ditebang sehingga memudahkan orang untuk melewatinya.

Munculnya yayasan Tionghoa karena masyarakat Tionghoa ingin menemukan identitas dirinya yang autentik dan originalitas. Pada dasarnya proses ini karena etnis Tionghoa menyadari atas otonominya sebagai aktor kehidupan sosial dan kemampuannya menjadi pengarang yang menuliskan identitas sosialnya. Selain itu, yayasan Tionghoa merupakan wadah untuk berdiskusi atau bertukar pikiran dalam membahas adat istiadat kebudayaan masyarakat Tionghoa sesuai dengan ajaran Kong Hu Cu .

Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh orang atau badan hukum untuk mencapai suatu tujuan yang tidak untuk mengambil keuntungan. Yayasan didirikan dengan tujuan untuk kepentingan umum dan dapat mencakup berbagai bidang seperti sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yayasan merupakan badan hukum yang terpisah dari pendirinya dan memiliki hak dan kewajiban sendiri. Yayasan memiliki kekayaan sendiri dan dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yayasan juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pengurus, dewan pengawas, dan anggota yayasan.

Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah *stiching* yang berasal dari kata *Stichen* yang berarti membangun atau mendirikan dalam bahasa Belanda dan *Foundation* dalam bahasa Inggris. Istilah yayasan yang ada di dalam undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota yang ada pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang telah dijelaskan diatas mempunyai struktur dalam kepemimpinan yang terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas.

Sebelumnya keberadaan yayasan di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan fungsi yayasan. Pada tanggal 6 Agustus 2001 lahirlah undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang membahas tentang tujuan didirikannya yayasan. Dengan adanya undang-undang tersebut, telah diakui bahwa yayasan adalah lembaga yang memiliki kepastian dan badan hukum. Tujuan dibuatnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pengelolaan suatu yayasan serta memberikan yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, dan dapat mewujudkan fungsi yayasan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan.

Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, agama dan pendidikan tidak hanya untuk orang pribumi saja. Etnis Tionghoa yang sudah menetap di Indonesia juga memiliki kewenangan dalam berorganisasi salah satunya mendirikan yayasan. Meskipun periode pasca-Orde Baru tidak hanya dimaknai sebagai fenomena pergantian rezim kepemimpinan, tetapi juga perubahan kebijakan yang menyangkut hak-hak kewarganegaraan. Demokratisasi pasca orde baru membawa perubahan tentang makna menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Salah satu persoalan terkait hak-hak kewarganegaraan yang krusial dan menjadi perhatian di awal-awal reformasi adalah hak-hak kewarganegaraan etnik Tionghoa. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya dua kebijakan di era Presiden Habibie, yaitu Inpres No.26 Tahun 1998 yang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program atau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; dan Inpres No. 4 Tahun 1999, yaitu penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) sebagai syarat pembuatan dokumen kependudukan.

Yayasan tionghoa adalah perkumpulan yang didirikan masyarakat Tionghoa dalam suatu maksud dan tujuan tertentu sifatnya luas untuk membangun sesuatu hal yang besar bagi masyarakat tionghoa maupun

masyarakat lainnya. Dalam penelitian penulis memfokuskan dua yayasan Tionghoa di Singkawang yakni, Yayasan Bhakti Suci dan Yayasan Pantulan Terang.

1. Yayasan Bhakti Suci Kota Singkawang

Yayasan Bhakti Suci Singkawang adalah pecahan dari Yayasan Bhakti Suci Pontianak yang sekarang bernama Yayasan Panca Bhakti. Yayasan Bhakti Suci untuk di Kalimantan Barat berada di tiga daerah, yakni Pontianak, Ngabang dan Singkawang. Yayasan Bhakti Suci Singkawang adalah yayasan yang didirikan masyarakat Tionghoa di Singkawang berkontribusi dalam tiga bidang, yakni bidang sosial, bidang keagamaan, dan bidang pendidikan.

Kekuatan politik di Kota Pontianak dan Kota Singkawang identitas dibangun dengan menggunakan yayasan yang tergabung dalam yayasan kematian. Di dalam yayasan ini rasa solidaritas tradisional Cina ditumbuhkembangkan seperti bangsa Indonesia membangun nasionalismenya untuk melawan bangsa kolonial Belanda yang kemudian mengantarkan bangsa Indonesia dalam suasana kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia dewasa ini. Demikian juga, tujuan perjuangan politik identitas kelompok etnis tionghoa adalah untuk mendapatkan persamaan status bagi semua etnis di Indonesia dalam politik. Kelompok etnis tionghoa dalam membina kekerabatan sesama warga kelompoknya sehingga merasakan satu kesatuan yang utuh dan kukuh adalah yayasan sosial kematian.

2. Yayasan Pantulan Terang Purnama

Yayasan Pantulan Terang adalah yayasan yang didirikan masyarakat Tionghoa di Singkawang . Yayasan ini terletak di Jalan Kalimantan No.09 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah. Keberadaan yayasan di tengah Kota Singkawang sangat mudah untuk di temui. Yayasan Pantulan Terang berdiri pada tanggal 14 Oktober 2020. Yayasan ini baru berjalan kurang lebih 3 tahun di Singkawang.

Yayasan Pantulan Terang merupakan kesatuan dari dua vihara yang berdekatan yakni Kelenteng Fuk Tet Chi dan Vihara Gita Triratna. Yayasan ini didirikan dengan melatarbelakangi karena pengurus lama dari kedua tempat ibadah tersebut sudah meninggal dan tidak berfungsi lagi. Yayasan Pantulan Terang merupakan yayasan yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial. Untuk bidang pendidikan masih perencanaan kedepannya.

Dari latar belakang tersebut, Vihara Gita Triatna merupakan Vihara tua yang didirikan oleh seorang Bikuni. Vihara ini masih bercorak zaman koloni Belanda baik dari segi bangunan maupun barang-barang peninggalan yang ada di dalam Vihara Gita Ratna . Sampai sekarang vihara Gita Triatna masih ada plang daerah Kota Sambas karena dulunya kota Singkawang merupakan bagian dari Kabupaten Sambas. Selain itu, Vihara ini sangat diaga kelestariannya dari segi bangunan maupun lainnya. Sehingga, pada perayaan besar Tionghoa, Imlek dan Cap Go Meh tidak digunakan lagi. Melihat dengan kondisi sekarang, masyarakat Tionghoa sangat menjaga peninggalannya bahkan dijadikan ikon di Singkawang.

Untuk Perayaan Imlek dan hari besar Tionghoa lainnya pengurus yayasan Pantulan Terang Purnama lebih menggunakan Klenteng Fuk Tet Chi karna dilihat dari segi bangunan yang kokoh , halaman yang luas memudahkan sekali untuk akses dalam perayaan apapun. Selain itu, Klenteng Fuk Tet Chi ini adalah tempat ibadah sehari-hari masyarakat sekitar disana karena letaknya di dekat pasar Hongkong Singkawang sebagaimana kita ketahui yang merupakan penduduknya kebanyakan orang Tionghoa

C. Struktur Kepengurusan Yayasan Tionghoa

1. Yayasan Bhakti Suci

Andrew Soewardi adalah seorang pendiri Yayasan Bhakti Suci Singkawang sekaligus ketua kepengurusan yang mana di bentuk pada tahun 1981. Untuk rekan kepengurusan lainnya dalam terbentuknya yayasan ini yaitu:

- a. Yunus sebagai Ketua II
- b. Nugroho Halim sebagai Ketua III
- c. Haccekin Mokin sebagai Sekretaris
- d. Arian Triarga.M sebagai Wakil Sekretaris
- e. Kasly sebagai Bendahara
- f. Darmadi sebagai Wakil Bendahara
- g. Muspita sebagai Penasehat
- h. Uspik sebagai Pengawas
- i. Anggota lainnya;
 - 1) Bachtiar
 - 2) Cu tet Fu
 - 3) Phan Nam Khui
 - 4) Lie Se Thiam
 - 5) Fu un Kie
 - 6) Chai Hin Thuonh
 - 7) Chang Sau Fa
 - 8) Fu Kung Khiun
 - 9) Bunarto
 - 10) Suryamin
 - 11) Samuel Thomas
 - 12) Tjahadi
 - 13) Darmawan Halim
 - 14) Abdulrachman

2. Yayasan Pantulan Terang Purnama

Struktur Kepengurusan periode 2020-2025

- a. Dewan Pembina
 - 1) Fam Djit Tjiong (Ketua)
 - 2) Be Su Lie
 - 3) Eka Dallas
 - 4) Sukaryadi
 - 5) Tjang Susanto

- b. Dewan Pengawas
 - 1) Bong Bui Pham (Ketua)
 - 2) Bong Ci Fuk
 - 3) Lam Khian Chong
 - 4) Tjong Djin Meuw
- c. Ketua
Tjung Kie Tjhin
- d. Wakil Ketua
Tham Tjong Syin
- e. Sekretaris
Dicky
- f. Wakil Sekretaris
So Eng Huak
- g. Bendahara
Tjhiung Sjin
- h. Wakil Bendahara
Vicky Pandy
- i. Bidang-Bidang
 - 1) Andrean Wongso, S.E (Humas)
 - 2) Ho Miau Khian (Humas)
 - 3) Dicky Larson (Pendidikan)
 - 4) A-Tung Als. Ng Hoi Thung (Keagamaan)
 - 5) Rivaldo (Sosial)

D. Tokoh Pendiri Yayasan Tionghoa

1. Yayasan Bhakti Suci

Andrew Soewardi adalah seorang pendiri Yayasan Bhakti Suci Singkawang sekaligus ketua kepengurusan yang mana di bentuk pada tahun 1981.

2. Yayasan Pantulan Terang

Tjung Kie Thjin adalah seorang pendiri Yayasan Pantulan Terang sekaligus ketua kepengurusan dari tahun 2020 sampai sekarang. Beliau lahir di Sambas tepatnya di Kecamatan Seangkung pada tanggal 22 September 1971. Sekarang beliau bertempat tinggal di Singkawang tepatnya di jalan Kalimantan, No 6 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah. Alasan beliau mendirikan Yayasan Pantulan Terang karena pengurus dua vihara yakni Kelenteng Fuk Tet Chi dan Vihara Gita Ratna sudah meninggal dan tidak berfungsi lagi. Untuk melestarikan kebudayaan Tionghoa, Bapak Tung Kie Thin mendirikan Yayasan Pantulan Terang.

E. Visi dan Misi serta tujuan Yayasan Tionghoa

Keberadaan sebuah lembaga seperti yayasan, tentunya harus memiliki visi dan misi yang jelas. Visi adalah suatu cara pandang, wawasan serta harapan yang dikehendaki. Sedangkan misi adalah suatu tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Yayasan Bhakti Suci dan Yayasan Pantulan Terang Purnama, tentunya memiliki visi dan misi yang telah melekat dalam setiap kegiatan. Adapun visi dan misinya sebagai berikut:

1. Yayasan Bhakti Suci

Visi dari Yayasan Bhakti Suci adalah memberikan pelayanan yang optimal dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di Kota Singkawang dan sekitarnya tanpa diskriminatif

Adapun misi dari Yayasan Bhakti Suci yakni ;

- a. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tanpa memandang suku, agama dan ras.
- b. Diprioritaskan pencegahan dan penanggulangan musibah kebakaran pada fisik bangunan

- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dan pemadam kebakaran baik yang ada di Kota Singkawang dan sekitarnya maupun diluar Kota Singkawang dalam hal penanggulangan dan pencegahan masalah kebakaran
- d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran untuk mengurangi dan mencegah resiko terjadinya musibah kebakaran.

2. Yayasan Pantulan Terang Purnama

Visi dari Yayasan Pantulan Terang Purnama adalah mewujudkan lembaga Buddha yang unggul dalam melayani umat di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur

Adapun misi dari Yayasan Pantulan Terang Purnama yaitu :

- a. Menyelenggarakan berbagai layanan sosial dalam membantu pemberdayaan umat
- b. Menyelenggarakan program pendidikan formal dan non formal dalam menciptakan generasi bangsa yang berkarakter
- c. Melaksanakan kerjasama dan sinergitas program dengan pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.